



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. LIES FAHIMAH, M.Si**
NIP : 19631207 199102 2 001
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka dirasa perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dibuat sebagaimana dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 23 Januari 2018

Mengetahui,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. SUGIANTO SABRAN

**Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
1.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	(Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng dibagi Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng) dikali 100	DP3A-PPKB, BAPPEDALitbang, Bakeuda
2.	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislatif	(Jumlah Perempuan di lembaga legislative (DPRD) dibagi Jumlah Anggota Legislatif (DPRD)) dikali 100	DP3A-PPKB, BPS, Setwan
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	(Jumlah Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga dibagi Total Pendapatan) dikali 100	DP3A-PPKB, BPS
3.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan) dikali 1000	DP3A-PPKB (P2TP2A)
4.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Yang dilayani sesuai Standar dibagi Jumlah Perempuan Korban Kekerasan) dikali 100	DP3A-PPKB (P2TP2A)
5.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	(Jumlah Kab./Kota Layak Anak dibagi Jumlah Kab./Kota) dikali 100	DP3A-PPKB
		Rasio anak korban kekerasan	(Jumlah Anak Korban Kekerasan dibagi Jumlah Anak) dikali 1000	DP3A-PPKB (P2TP2A)
6.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	(Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani sesuai standar dibagi Jumlah Anak Korban Kekerasan) dikali 100	DP3A-PPKB (P2TP2A)
7.	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	Jumlah PD yang memiliki sistem data gender dan anak dibagi Jumlah PD) dikali 100	DP3A-PPKB
8.	Meningkatnya koordinasi perencanaan,	Hasil Penilaian SAKIP	-	Inspektorat, Biro Ortal

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara perhitungan	Sumber data
	pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran			
9.	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksi	BPS, BKKBN
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga	BPS, BKKBN
10.	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	Jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur (PUS) pada tahun yang sama	BPS, BKKBN
11.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need).	(Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB (Unmet Need KB) dibagi Total Jumlah PUS) dikali 100	BPS, BKKBN

Palangka Raya, 23 Januari 2018

Mengetahui,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

H. SUGIANTO SABRAN

**Dr. LIES FAHIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631207 199102 2 001**